

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pandemic virus corona (COVID-19) merupakan bencana luar biasa yang menyerang berbagai belahan dunia. Terhitung Desember tahun 2019 dunia di hebohkan dengan adanya virus COVID-19 yang muncul dari Wuhan, China (Lu, Stratton, & Tang, 2020). Virus ini diketahui pertama kali muncul di pasar makanan laut dan hewan di Kota Wuhan dan teridentifikasi sebagai penyebab penyakit pernapasan (Meydianto, 2020). Virus ini ditetapkan sebagai penularan infeksi virus corona dari manusia ke manusia pada tahun 2020 (Ansori, 2020). Penyebaran kasus yang terus meningkat dan hampir tidak terkendali membuat semua kegiatan terganggu bahkan terhenti sehingga mulai dilakukan secara online atau jarak jauh. Banyak negara mengalami kebingungan dalam membuat kebijakan untuk menangani COVID-19. Banyak negara mencoba membuat dan menerapkan berbagai kebijakan untuk menghambat dan mengatasi penyebaran virus COVID-19.

Pandemic COVID-19 tidak hanya berdampak pada aspek Kesehatan tetapi berdampak juga pada sector ekonomi, Pendidikan, Kesehatan mental, social dan Kesehatan reproduksi yang ada di Masyarakat (Nina, Untoro, & Yafi, 2021)(Rosyad et al., 2021)(Citra Dewi, Nurbaiti, Surahmat, & Putinah, 2021)(Syofian & Gazali, 2021)(Yamali & Putri, 2020). Berbagai cara Pemerintah menanggapi penyebaran COVID-19 secara global dengan penutupan sekolah, pembatasan perjalanan, larangan pertemuan publik, investasi darurat di fasilitas

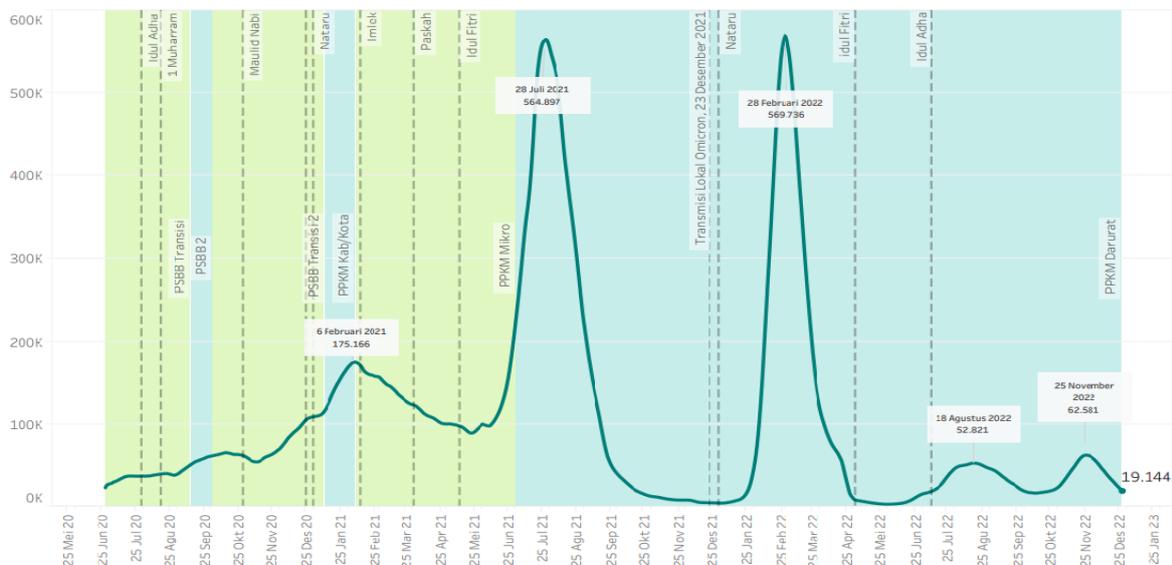
kesehatan, bentuk baru penyediaan kesejahteraan sosial, pelacakan kontak, intervensi untuk menahan penyebaran virus, meningkatkan sistem Kesehatan dan mengelola konsekuensi ekonomi (Hale et al., 2021). Upaya lain yang dilakukan yaitu memakai masker, menjaga jarak minimal 1 meter dan mencuci tangan dengan air mengalir (Supriyadi, 2020). Adapun *Lockdown* dan tinggal di rumah telah diberlakukan sebagai upaya untuk meratakan kurva dan mengendalikan penularan penyakit (Pokhrel & Chhetri, 2021). Hal ini dilakukan untuk menekan penyebaran COVID-19, sehingga dapat mengurangi dampak dan resiko penularan COVID-19 dari satu orang ke orang lain. Beberapa negara yang mempunyai penanganan COVID-19 yang cukup baik yaitu Cina, Taiwan, Korea Selatan dan Singapura karena negara tersebut mempunyai kemampuan dalam perencanaan koordinasi kelembagaan dalam kesiapsiagaan emergency nasional, tersedianya data dan informasi yang akurat dan memanfaatkan teknologi informasi dan adanya kebijakan yang strategis dalam mengatasi penyakit menular (Monggilo, 2020).

Kasus COVID-19 ini muncul di Indonesia berawal pada bulan Maret 2020 dan khususnya terus bertambah. Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali terkonfirmasi pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa telah ditemukan dua kasus infeksi COVID-19 di Indonesia (Djalante et al., 2020). Pasien terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia bermula dari kontak pasien dengan warga negara asing (WNA) asal Jepang yang sedang berdomisili di Malaysia dalam acara Jakarta. Pasien mengeluhkan demam, batuk, dan sesak napas setelah pertemuan tersebut (WHO, 2020a). Dengan munculnya kasus positif

COVID-19 di Indonesia menjadi sebuah tantangan untuk Pemerintah Indonesia. Pada awal ditemukannya kasus COVID-19 Pemerintah menghimbau masyarakat agar tidak panik, namun penyebaran virus corona terjadi sangat pesat dan cepat sehingga perubahan kebiasaan pada kehidupan masyarakat pun berubah. Kasus COVID-19 di Indonesia sangat banyak dan susah untuk dikenadalikan.

Untuk menekan penyebaran COVID-19 Pemerintah dengan menetapkan kebijakan pembatasan sosial mulai dari PSBB hingga PPKM 4 level (Gitiyarko, 2021). Kebijakan pembatasan sosial yang di tetapkan berawal dari himbauan *social distancing*, pembentukan satgas COVID-19, PSBB1, PSBB Transisi, New Normal, PSBB skala mikro, PPKM, PPKM level 1-4 dan Vaksinasi (Junaedi, Arsyad, Salistia, & Romli, 2021). Penetapan kebijakan ini hanya bisa menahan atau menekan penyebaran COVID-19, karena belum ditemukannya obat penawar dan menghentikan pandemic COVID-19.

Gambar 1. 1 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia (28 Desember



Sumber : (Kemenkes RI, 2022b)

Gambar 1.1 menunjukkan kasus aktif COVID-19 hingga 28 Desember 2022 bahwa adanya kenaikan jumlah kasus secara signifikan. Kenaikan puncak kasus pertama pada tanggal 1 Februari 2021 dengan jumlah kasus sebanyak 175.166 kasus dengan kasus konfirmasi harian sebanyak 12.865 kasus, kedua pada 18 Juli 2021 lonjakan kasus sebanyak 564.897 kasus dengan kasus konfirmasi harian 50.039 kasus, ketiga pada 20 Februari 2022 jumlah kasus tertinggi mencapai 569.736 kasus dengan kasus harian 55.675 kasus lalu turun, keempat kasus yang terjadi pada 9 Agustus 2022 dengan jumlah 52.821 dengan kasus harian 5.593 kasus dan pada tanggal 20 November 2022 kasus yang terjadi sebanyak 62.581 kasus dengan kasus harian 6.695 kasus. Jumlah kasus COVID-19 yang terjadi di Indonesia ini melonjak dan merosot berdasarkan situasi mobilitas yang tinggi pada hari-hari besar dan longgarnya protokol kesehatan oleh Masyarakat.

Berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mengendalikan penyebaran virus COVID-19 mulai dari menggunakan masker, menjaga jarak, pengujian orang terpapar atau bergejala, pelacakan yang terpapar dan isolasi hal ini cukup membantu membatasi penularan di tempat-tempat umum yang diterapkan secara ketat, tetapi langkah tersebut dilaksanakan secara bervariasi dan terbukti tidak cukup efektif dalam menghambat penyebaran COVID-19 (Dominquez et al., 2022). Kesehatan dan perekonomian masyarakat sangat terganggu dengan hadirnya pandemic COVID-19 karena memberi beban secara moralitas dan morbiditas. Hingga akhir tahun 2020 World Health Organization (WHO), mengumumkan bahwa pemberian vaksin adalah cara untuk menghadapi kenaikan COVID-19 ini. Dengan kedaruratan yang dihadapi, pemerintah menetapkan

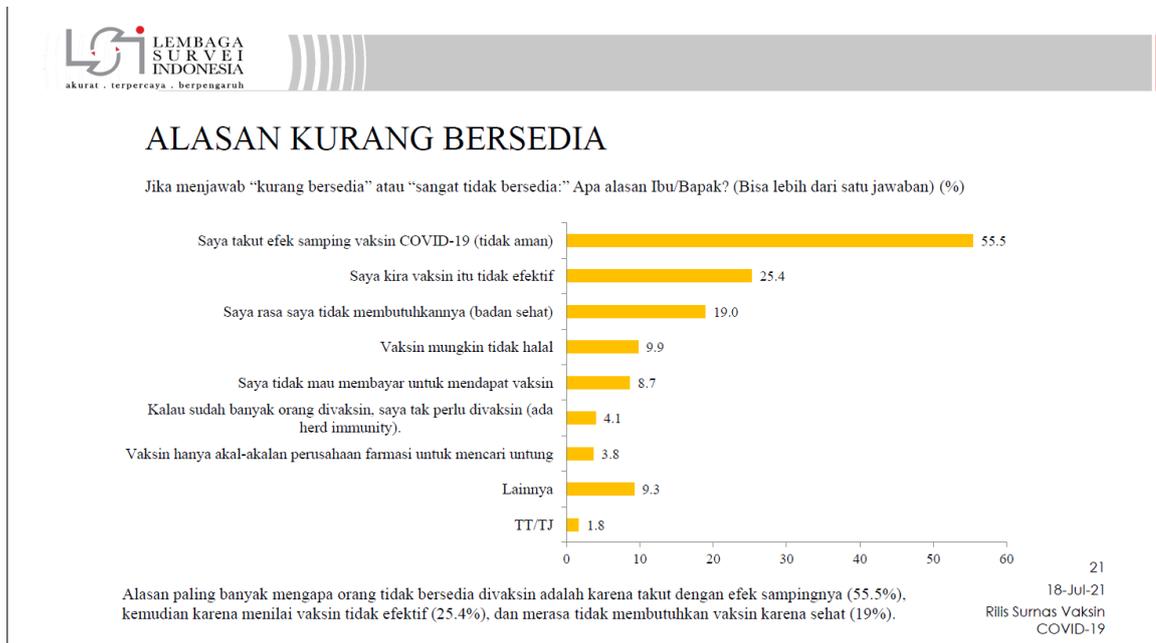
kebijakan tentang pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Vaksinasi merupakan cara pemerintah untuk mengendalikan COVID-19, dimana Pemerintah pemerintah harus bisa mendistribusikan vaksin hingga ke berbagai daerah secara merata karena vaksinasi COVID-19 dirasa aman dan efektif.

Vaksinasi berguna untuk meminimalisir penyebaran virus corona 2019 (COVID-19) dan platform ikut serta dalam perkembangan partisipasi vaksin (Jackson et al., 2020) (Walsh et al., 2020). Solusi jangka Panjang untuk pandemi COVID-19 yaitu vaksin yang aman, di Indonesia sudah ada lusinan vaksin dalam tahap pengembangan dan di antaranya masuk dalam uji klinis (Rowland, Johnson, & Wan, 2020). Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor H.K.01.07/Menkes/9860 /2020 tentang Penetapan jenis Vaksin untuk Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease (COVID 19) diketahui bahwa Indonesia menetapkan enam jenis vaksin yang digunakan di Indonesia. Pemerintah dan pejabat kesehatan harus siap menghadapi masyarakat yang tidak mau di vaksin dan mempromosikan vaksinasi sehingga masyarakat umum mau menerima vaksin.

Pada awal implementasi kebijakan vaksinasi COVID-19 berbagai tantangan dan hambatan yang di hadapi pemerintah. Hingga 25 Mei 2021 cakupan vaksinasi COVID-19 masih cukup rendah dari total target sasaran, hal ini disebabkan adanya keraguan untuk di vaksinasi, kapasitas dan kuantitas vaksin dan pendistribusian secara adil kepada masyarakat (Arina, Pujiyanto, & Hikmahwati, 2021). Factor-faktor tersebut mempengaruhi bersedianya masyarakat untuk di vaksin. Hasil survey yang dilakukan oleh Lembaga Survey Indoensia

(LSI) pada gambar 1.2 menunjukkan alasan kurang bersedianya masyarakat karena takut pada keamanan efek samping, menilai vaksinasi tidak efektif dan tidak membutuhkan vaksin karena merasa sehat.

Gambar 1. 2 Alasan Tidak Bersedianya Masyarakat Untuk Divaksin



Sumber : Lembaga Survei Indoensia

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap vaksin COVID-19 juga di sebabkan karena banyak beredar informasi palsu atau hoaks yang membuat keraguan pada opini masyarakat (Arina et al., 2021). Kurangnya vaksin serta beredarnya informasi palsu adalah hambatan yang signifikan dalam membangun dan mengembangkan kekebalan tubuh masyarakat di banyak negara (Lane, MacDonald, Marti, & Dumolard, 2018). Dibeberapa kota besar di Eropa lebih dari 100 ribu orang melakukan aksi unjuk rasa penolakan vaksinasi COVID-19 (Arbar, 2022). Aksi ini didasarkan pada tidak percayanya masyarakat terhadap pemerintah serta pembatasan untuk mengatasi COVID-19 dengan program vaksinasi.

Informasi palsu juga beredar di masyarakat Indonesia, contoh informasi palsu yang beredar di masyarakat melalui platform media dilihat pada gambar 1.2.

Gambar 1. 3 Informasi Palsu Vaksin COVID-19



Sumber : (Kominfo, 2021)

Informasi palsu yang beredar ini sangat mempengaruhi keberhasilan pemerintah dalam menanggulangi pandemic COVID-19. Mengatasi masalah itu pemerintah menggunakan Komunikasi Pemerintahan secara terus-menerus untuk memberikan informasi yang benar kepada masyarakat tentang vaksin dan vaksinasi COVID-19. Pada masa COVID-19 adanya temuan pola komunikasi pemerintahan yang berubah, hal ini terjadi karena adanya perubahan kepemimpinan dan pergeseran pola komunikasi yang terkait sikap masyarakat yang masih ragu dengan vaksinasi Covid 19 pemerintah perlu mengambil langkah strategi

komunikasi yang lebih efektif, sehingga menurunkan tingkat apatis dan menghasilkan perubahan sikap di kalangan masyarakat yang masih ragu terhadap vaksinasi Covid 19 (Sukandar, Nurhajati, & Oktaviani, 2022).

Untuk melihat komunikasi pemerintahan dapat dilihat dari komunikasi internal dan komunikasi eksternal (Sulistiani & Wijaya, 2021). Komunikasi internal ini merupakan pesan yang di sampaikan dalam organisasi di antaranya pemimpin dengan pemimpin dan pemimpin dengan bawahannya sesama Pemerintah dalam penanganan COVID-19. Sedangkan komunikasi eksternal adalah komunikasi antar instansi Pemerintah, pihak swasta dan masyarakat seperti pada informasi tentang COVID-19 dan vaksinasi COVID-19 yang terus di update tiap harinya agar masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan informasi. Pada masa penerapan kebijakan vaksinasi COVID-19 komunikasi eksternal ini yang lebih aktif karena pemerintah memberikan informasi kepada masyarakat dengan platform sosial media dan media massa (Gunawan & Toni, 2022).

Hal terpenting dari komunikasi terkait vaksinasi COVID-19 saat ini adalah komunikasi yang berlangsung harus ditangani secara komprehensif, sistematis dan searah kepada publik semua yang terkait dengan vaksinasi COVID-19. Komunikasi pemerintahan sangat berperan dalam partisipasi masyarakat untuk vaksinasi COVID-19 karena dengan strategi komunikasi ini Pemerintah dapat berkomunikasi serta meyakinkan masyarakat. Keraguan masyarakat terhadap vaksinasi COVID-19 ini adalah tantangan yang paling berat terutama dalam membenarkan informasi yang beredar di masyarakat. Maka dari itu untuk mencapai keberhasilan partisipasi COVID-19 dapat dilihat salah satu faktornya

yaitu komunikasi pemerintahan. Berbagai Upaya yang dilakukan Pemerintah untuk memberikan informasi kebijakan vaksinasi COVID-19 yaitu dengan memanfaatkan komunikasi public, media massa baik cetak, digital maupun elektronik serta menggandeng beberapa pihak, hal ini dilakukan secara terus menerus agar dapat mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi (Suri, Hidayat, & Halim, 2021). Penggunaan media ini dilakukan karena paling efektif dengan kondisi pandemic COVID-19.

Komunikasi pemerintahan menjadi salah satu factor krusial dalam menjadi keberhasilan program kebijakan vaksinasi COVID-19. Berdasarkan latar belakang ini penelitian ini mencoba membahas tentang komunikasi pemerintahan dalam penerapan kebijakan vaksinasi COVID-19 untuk tercapainya tujuan program dalam mengatasi pandemic COVID-19. Pencapaian vaksinasi COVID-19 di Indonesia dapat dikatakan berhasil karena telah mendekati target atau total dari populasi masyarakat Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu “Bagaimana Komunikasi Pemerintahan Kepada Masyarakat Dalam Penerapan Kebijakan Vaksinasi COVID-19?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui Komunikasi Pemerintahan Kepada Masyarakat Dalam Penerapan Kebijakan Vaksinasi COVID-19.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis ini untuk mengetahui bagaimana informasi yang bersifat ilmiah bagi pengembangan yang berkaitan dengan komunikasi pemerintahan dalam penerapan kebijakan vaksinasi COVID-19, khususnya dalam ruang lingkup pemerintahan dan penelitian ini diharapkan mampu memberikan ilmu dan dapat menjadi referensi kepada penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis ini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi pihak kepentingan yang bersangkutan dalam mengetahui komunikasi yang dilakukan pemerintah dalam mensukseskan keberhasilan vaksinasi COVID-19 dan dapat dijadikan acuan untuk mengetahui kendala dalam komunikasi pemerintahan dalam penerapan vaksinasi COVID-19